



**ANALISIS MUATAN MATERI POLITIK BUKU KELAS 4
SEKOLAH DASAR**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Dhekawati

3301410022

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

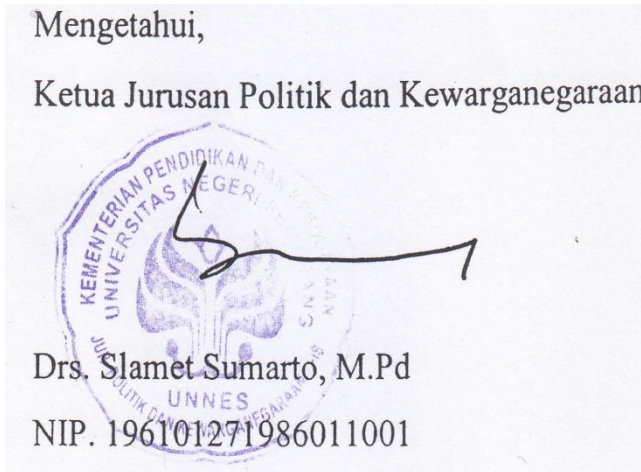
Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 196101271986011001

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several strokes, is written on a light background.

Drs. At. Sugeng Pr, M.Si
NIP. 196304231989011002

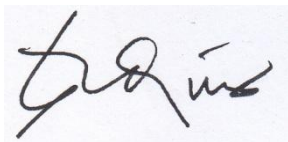
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

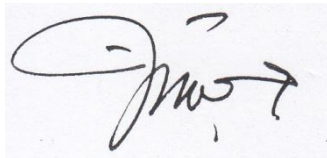
Penguji I



Drs. Tijan, M.Si

NIP.195812081981031005

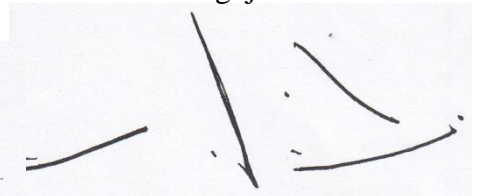
Penguji II



Andi S., S.Pd., M.Si

NIP.197610112006041002

Penguji III



Drs. At. Sugeng Pr, M.Si

NIP.196304231989011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Subagyo, M.Pd

NIP. 19510808 1980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2014



Dhekawati

NIM 3301410022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan hanya menunggu tapi lihat dan kerjakan apa yang ada sekarang.

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Karso dan Ibu Sri Sulipah.
2. Teman-teman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2010.
3. Almamater saya Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Muatan Materi Politik Buku Kelas 4 Sekolah Dasar” dalam rangka menyelesaikan Studi Strata Satu untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi Strata Satu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan pelaksanaan penelitian.
4. Drs. At. Sugeng Pr. M.Si, Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Teman seperjuangan mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2010 yang senantiasa memberi dukungan dan membantu pelaksanaan penelitian.
6. Adi Hidayat, Muhamad Fakhurrozi, Ridho Adi, Azharistya, Ika Septiani, Bina Setiawan, Kurnianto Hanif dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
7. Teman-teman Lifridz Kos yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
8. Semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan dalam membantu terselesainya skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Semarang, januari 2015

Penulis

SARI

Dhekawati. 2014. “*Analisis Materi Politik Buku Kelas 4 Sekolah Dasar*”. *Skripsi. Jurusan Politik Kewarganegaraan.* Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. At. Sugeng Pr. M, Si.

Kata Kunci : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Politik, Sekolah Dasar, Buku Teks.

Buku merupakan hal pokok dan penting dalam pendidikan. Buku berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan guna mencapai tujuan pendidikan. Buku dijadikan sebagai pegangan oleh siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini membahas tentang muatan materi pada buku teks di lihat dari sudut pandang satu mata pelajaran yaitu PPKn. Materi yang ingin dikaji terkait dengan materi politik yang ada dalam buku teks tersebut. Permasalahan yang diungkapkan adalah : bagaimanakah muatan materi politik dalam buku kelas 4 SD. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui muatan materi pada buku teks tematik kelas 4 SD yang dijadikan pedoman pembelajaran pendidikan politik untuk anak-anak.

Penelitian ini merupakan penelitian *content analysis* (analisis isi) dengan objek penelitian adalah buku teks tematik kelas 4 SD terbitan Kemendikbud 2013. Fokus penelitian ini melihat muatan materi politik pada buku tematik kelas 4 SD dari analisis *civic knowledge, skills, dan disposition*.. Uji keabsahan hasil penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan pengelompokan isi buku kemudian dilakukan analisis terhadap isi buku.

Buku kelas 4 SD, buku tematik terbitan Kemendikbud 2013 merupakan buku teks yang berbasis aktivitas. Dalam buku ini cenderung sedikit materi yang dijabarkan, karena fokus pemahaman siswa pada aktivitas mandiri dan kelompok yang ada dalam buku. Analisis isi buku tematik kelas 4 SD terbitan Kemendikbud 2013, berdasarkan *civic knowledge, skills dan disposition* sesuai dengan kurikulum baru 2013, ruang lingkup yang terdapat dalam materi PPKn yaitu tentang simbol-simbol Pancasila dan lambang negara; hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara; makna keberagaman personal, sosial dan kultural; persatuan dan kesatuan; moralitas sosial dan politik warga negara atau pejabat negara dan tokoh masyarakat, semuanya telah terjabarkan dalam buku ini. *Civic skills* yang dijabarkan berdasarkan aktivitas siswa dalam setiap pembelajarannya, kemudian di simpulkan *civic disposition* yang muncul.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam buku teks tematik kelas 4 SD terbitan Kemendikbud 2013 ini terdapat muatan materi politik dalam bentuk kegiatan siswa, melalui pengenalan simbol-simbol negara, pemahaman kebangsaan dan juga kegiatan politik dasar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Istilah	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pendidikan Kewarganegaraan	
1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan.....	9
2. Cakupan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	12
3. Komponen Paradigma Baru PPKn	

a. Civic Knowledge.....	14
b. Civic Skills.....	14
c. Civic Disposition	17
B. Politik	
1. Pengertian Politik.....	21
2. Konsep-Konsep Pokok Politik.....	23
3. Bidang Kajian Materi Politik	25
4. Perilaku Politik.....	25
C. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar	
1. Perkembangan PPKn di Sekolah Dasar	26
2. Kurikulum PPKn di Sekolah Dasar Menurut Kurikulum 2013	28
3. Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar Menurut Kurikulum 2013	31
D. Penulisan Bahan Ajar	
1. Pengertian Bahan Ajar	32
2. Teknik Pengembangan Bahan Ajar.....	33
3. Cara Penyajian Bahan Ajar dalam Buku Teks.....	34
E. Kerangka Berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Dasar Penelitian	37
B. Objek Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Uji Keabsahan Data / Verifikasi Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Buku Teks Tematik Kelas 4 SD Kurikulum 2013	42
B. Analisis Muatan Materi Politik dalam Buku Teks Tematik Kelas 4 SD Terbitan Kemendikud 2013	45
1. Civic Knowledge.....	47
2. Civic Skills.....	52
3. Civic Disposition	60
4. Muatan Materi Politik dalam Buku Tematik Kelas 4 SD.....	63
C. Analisis Isi Buku Teks Tematik Kelas 4 SD Kurikulum 2013.....	64
1. Buku Teks	65
2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	66
a. Ketersediaan Materi	69
b. Aktivitas Mandiri dan Kelompok	70
c. Gambar / Catatan	72
D. Kelebihan dan Kekurangan Buku Teks Tematik Kelas 4 SD Terbitan Kemendikbud 2013	72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	79
----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Analisis Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Disposition Buku Tematik Kelas 4 SD Mata Pelajaran PPKn	79
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 2. Content Analysis	41
Gambar 3. Materi	70
Gambar 4. Aktivitas Individu	71
Gambar 5. Aktivitas Kelompok	71
Gambar 6. Catatan / Gambar	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Keterampilan Intelektual.....	15
Tabel 2. Komponen Keterampilan Partisipan.....	16
Tabel 3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	66
Tabel 4. Muatan materi PPKn pada SD	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku merupakan salah satu hal pokok dalam pendidikan. Buku berperan penting dalam meningkatkan suatu mutu pendidikan. Buku dalam pendidikan berperan sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Buku merupakan syarat untuk suatu tujuan pendidikan itu tercapai. Dalam sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa:

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam suatu jenjang pendidikan selalu ada buku yang dijadikan pegangan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Buku yang digunakan sebagai sumber pembelajaran utama dalam suatu jenjang pendidikan biasanya disebut dengan buku teks atau buku pelajaran. Buku teks merupakan sarana penting dalam suatu sistem pembelajaran, karena buku teks tersebut merupakan bahan ajar dan juga dijadikan sebagai sumber pembelajaran tersebut. Tagiran, dalam Sucianingsih (2013: 2) menyatakan bahwa:

Buku teks sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah di pahami oleh para pemakai di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.

Dalam suatu proses belajar mengajar, buku dijadikan pegangan baik siswa maupun guru. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang buku teks atau buku pelajaran kelas 4 SD yaitu buku kurikulum 2013, buku teks tematik kelas 4 SD. Buku teks tematik tersebut merupakan buku pelajaran yang digunakan untuk semua mata pelajaran yang ada dalam kurikulum pembelajarannya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin fokus meneliti terkait dengan kajian materi yang ada dalam salah satu mata pelajaran dalam buku teks tematik tersebut, yaitu terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus diajarkan mulai jenjang pendidikan dasar. Cakupan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangatlah luas, selain tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sejarahnya, pendidikan nilai dan moralnya, kehidupan sosial masyarakat, wawasan nusantara, ketahanan nasional, hukum dan konstitusi negara, juga tentang politik.

Memilah satu dari beberapa cakupan di atas, yaitu tentang politik, berbicara tentang politik tentunya menarik, banyak hal yang bisa dipelajari dalam politik, entah itu tentang cara memperoleh kekuasaan, etika dalam berpolitik, partai politik, komunikasi politik, budaya politik masyarakat dan masih banyak hal yang lainnya. Dalam Budiarto: 1996:8 dinyatakan bahwa:

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Kehidupan politik berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja dan tidak sengaja melalui pendidikan formal dan informasi maupun secara tidak sengaja melalui pengalaman sehari-hari. Pembelajaran tentang politik dalam lembaga formal yaitu sekolah dilakukan melalui suatu wadah mata pelajaran tertentu yang telah didesain untuk penyampaian materi tersebut. Pembelajaran tentang politik juga bisa dilakukan melalui lingkungan non formal, yaitu dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Pembelajaran tentang politik biasa disebut dengan sosialisasi politik.

Sosialisasi politik itu sendiri adalah proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan; juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Dilihat dari segi pandangan politik tertentu, sosialisasi politik luar biasa pentingnya sebagai proses, dengan mana individu-individu, sampai pada kadar berbeda, bisa terlibat dalam satu sistem politik yaitu dalam partisipasi politik (Rush, 1990: 23).

Sosialisasi politik dapat dilakukan antara lain melalui, pendidikan politik, mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, agregasi kepentingan, seleksi kepemimpinan, dan komunikasi politik (Kantaprawira, 1999: 55-62). Mengutip satu diantaranya yaitu melalui pendidikan politik, sosialisasi politik itu dapat dilakukan. Pendidikan politik merupakan upaya sadar yang diarahkan untuk

membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik secara sederhana dapat dikatakan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan kata lain, pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan agar setiap orang menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam kehidupan politik (Sunarto, 2004: 10).

Pendidikan politik melalui lembaga formal sekolah, diikutkan dalam muatan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebenarnya sudah sejak mulai tahapan sekolah dasar materi politik ini ada. Tetapi, untuk fase anak-anak muatan politik pada pendidikan pancasila dan kewarganegaraan hanya pada hal dasar saja.

Easton dan Dennis (dalam Michael Rush dan Philip Althoff, 1990: 59-60) mengemukakan empat tahap perkembangan dalam sosialisasi politik diri anak-anak, yaitu:

1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, preseiden, dan politisi.
2. Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti Kongres, Mahkamah Agung, dan pemungutan suara (pemilu).
4. Perkembangan perbedaan anatara institusi-institusi politik dan mereka terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan institusi-institusi ini, sehingga gambaran yang diidealisasi mengenai pribadi-pribadi khusus seperti presiden

atau seseorang anggota kongres telah dialihkan pada kepresidenan dan kongres.

Dari uraian di atas tentunya telah jelas bahwa pendidikan politik dapat dilakukan pada anak-anak, dan muatan pendidikan politik diikuti sertakan dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada lembaga formal sekolah. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul penelitian pada tugas akhirnya yaitu ANALISMUATAN MATERI POLITIK BUKU KELAS 4 SEKOLAH DASAR.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana muatan materi politik dalam buku kelas 4 SD (buku kurikulum 2013, buku tematik)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, untuk mengetahui muatan materi politik dalam buku kelas 4 SD kurikulum 2013.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah khasanah pengembangan pustaka ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus pada kajian lingkup bahan ajar mahasiswa sebagai referensi bagi yang akan melakukan

penelitian sejenis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada:

a. Bagi guru

Menambah kajian ilmu tentang pendidikan politik pada muatan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khususnya untuk anak asuhnya di sekolah dasar.

b. Bagi peneliti

Menambah kajian ilmu tentang pendidikan politik, dan dapat diterapkan ketika nanti menjadi seorang pengajar.

E. Batasan Istilah

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia (Soegito, 2009:5). Sedangkan Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengertian tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Sunarto, 2010: 11).

Pendidikan kewarganegaraan akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari peserta didik dengan perilaku yang:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- b. Berbudi luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- d. Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
- e. Aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

(Sunarto dkk, 2010: 12).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan dengan tujuan agar warganegarannya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; menjadi warga negara demokratis yang beradab; yang memiliki daya saing; berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

2. Politik

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, dan kebijakan itu nantinya harus diterima oleh masyarakat.

Politik biasanya menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat secara luas. Karl W. Deutsch dalam (Budiharjo, 1996: 12) menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Politik menyangkut kepentingan suatu negara atau dalam kata lain, politik berkaitan tentang pemerintahan.

3. Sekolah Dasar

Sekolah merupakan lembaga formal yang memberikan pengalaman belajar terencana. Sekolah merupakan tempat di mana proses belajar mengajar dilakukan. Di sekolah terdapat pengajar formal yang disebut dengan guru, dan juga peserta belajar atau biasa dikatakan sebagai murid. Sekolah ada beberapa jenjang pendidikan, mulai dengan sekolah dasar dan menengah, untuk lebih lanjutnya yaitu universitas.

Sekolah dasar adalah sekolah jenjang pertama atau dasar untuk anak usia 6-13 tahun. Sekolah dasar ini berlangsung selama 6 tahun dibagi menjadi 6 tingkatan kelas yaitu mulai dengan kelas satu sampai dengan kelas 6.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Zamroni dalam (Hamidi,2010:77), menyatakan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge (pengetahuan politik), political awareness (kebiasaan politik), political attitude (tingkah laku politik), dan political partisipation (partisipasi politik) serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia (Soegito, 2009:5). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wadah untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari

peserta didik baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan dengan tujuan agar warganegaranya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; menjadi warga negara demokratis yang beradab; yang memiliki daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. PPKn adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Dalam wacana “civic education” sebagai kajian ilmiah kependidikan tercatat adanya perkembangan dalam pemikiran tentang “civic education”. Banks dan Barber (dalam Winataputra 2007: 11) mengemukakan kajian yang hampir sama tentang civic education. Banks mengkaji berbagai tantangan sehubungan dengan meningkatnya siswa kelompok minoritas yang perlu dikembangkan menjadi warganegara dan pekerja yang produktif, diperlukan upaya membantu siswa untuk “think critically”, yakni mengembangkan siswa untuk berfikir kritis dalam menghadapi masalah-masalah politik yang krusial dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Sedangkan Barber, ia menekankan perlunya pengembangan “action oriented citizens” (orientasi tindakan warganegara) yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan publik, oleh karena itu, setiap

warga negara harus belajar bagaimana melibatkan diri dalam kegiatan politik atau perdebatan politik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupaya menanamkan sikap kepada warga generasi muda penerus bangsa agar:

- 1) Memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan dan rasa cinta tanah air sebagai perwujudan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- 2) Memiliki wawasan dan penghargaan terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia sehingga mampu berkomunikasi baik dalam rangka memperkuat integrasi nasional;
- 3) Memiliki wawasan, kesadaran dan kecakapan dalam melaksanakan hak, kewajiban, tanggung jawab dan peran sertanya sebagai warga negara yang cerdas, trampil dan berkarakter;
- 4) Memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta kewajiban dasar manusia sehingga mampu memperlakukan warga negara secara adil dan tidak diskriminatif;
- 5) Berpartisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan pada nilai dan budaya demokrasi yang bersumber pada Pancasila;
- 6) Memiliki pola sikap, pola pikir dan pola perilaku yang mendukung ketahanan nasional Indonesia serta mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan perkembangan zaman demi kemajuan bangsa.

(<http://hamiddarmadi.blogspot.com/2013/07/urgensi-pendidikan-pancasila-dan.html>) diunduh senin 12 Januari 2015, jam 8:50)

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan juga disampaikan (dalam Budimansyah, 2008: 5) yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan sehingga siswa menjadi warganegara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik.

2. Cakupan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Azra dalam (Hamidi, 2010: 76) menjelaskan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya luas daripada pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, cakupan pendidikan kewarganegaraan mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintah, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban negara, proses demokrasi, partisipasi aktif, dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat, pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik, dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya, kelestarian lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang tidak terlepas dari “political science” atau ilmu politik. Dalam konteks pendidikan ilmu sosial di sekolah dasar dan sekolah lanjutan, political science menekankan pada pengembangan :”...knowledge of political behaviour, of formal governmental institutions and legal structure, of political system and international

systems; capacity to think about political phenomena; to distinguish facts and values; and capabilities and skills needed to participate effectively and democratically in the life of society (Pengetahuan tentang perilaku politik, institusi pemerintahan dan struktur hukum, sistem politik dan sistem internasional, kemampuan untuk berfikir tentang fenomena politik, untuk membedakan fakta dan nilai-nilai, kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dan demokratis dalam kehidupan) (Winataputra, 2007:18).

Indonesia sebagai negara demokrasi, pendidikan kewarganegaraan didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kulikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara; secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Winataputra,2007:125-126).

Civic education juga memberdayakan seseorang untuk memberi makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal bangsa,

cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, civil society dan konstitusionalisme.

3. Komponen Paradigma Baru PPKn

a. Civic Knowledge

Cholisin dalam (Cholisin, 2005: 4) menjelaskan, *Civic Knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara, dalam hal ini peserta didik. Pada prinsipnya pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan hak-kewajiban atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

b. Civic Skills

Ketrampilan kewarganegaraan (Cholisin, 2005: 6) merupakan ketrampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, ketrampilan ini dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup intellectual skills (ketrampilan intelektual) dan participation skills (kemampuan partisipasi).

Ketrampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah berpikir

kritis. Ketrampilan berpikir kritis terdiri atas mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat berkenaan dengan masalah yang ada.

Tabel 1. Komponen Ketrampilan Intelektual

No	Unsur Intelektual	Penjabaran
1	Mengidentifikasi (menandai atau menunjukkan)	Membedakan, mengelompokkan atau mengklasifikasikan, menentukan bahwa sesuatu itu asli
2	Menggambarkan (memberikan uraian atau ilustrasi)	Memberikan uraian tentang sesuatu misalnya tentang proses, lembaga, fungsi, alat, tujuan, dan kualitas
3	Menjelaskan (mengklarifikasi atau menafsirkan)	Misalnya tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu, makna, dan pentingnya peristiwa atau ide, dan alasan dalam bertindak
4	Menganalisis	Misalnya tentang unsur-unsur atau komponen ide (gagasan), proses politik, dan institusi-institusi, konsekuensi dari ide, proses politik, dan institusi-institusi, serta memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik.
5	Mengevaluasi pendapat atau posisi	Menggunakan kriteria atau standar untuk membuat keputusan tentang kekuatan dan

		kelemahan issue atau pendapat dan menciptakan pendapat baru
6	Mengambil pendapat atau posisi	Dari hasil seleksi berbagai posisi dan membuat pilihan baru
7	Mempertahankan pendapat atau posisi	Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atau posisi yang dipertahankan/diambil atau dibela, merespon posisi yang tidak sesuai.

Sumber: (Cholisin, 2005: 7)

Tabel 2. Komponen Ketrampilan Partisipasi

No	Unsur Ketrampilan	Pembelajaran
1.	Berinterasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun. b. Menjelaskan artikulasi kepentingan. c. Membangun koalisi, negosiasi, dan kompromi. d. Mengelola konflik secara damai. e. Mencari konsensus,
2.	Memantau atau Memonitor	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan. b. Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga publik seperti, pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa atau BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
3.	Mempengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR atau DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan suara dalam suatu pemilihan. c. Membuat petisi. d. Melakukan pembicaraan atau memberi kesaksian dihadapan lembaga publik. e. Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain. f. Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.
--	--	--

Cholisin, 2005: 8, yang diolah dari Center for Civic Education (1994). National Standard for Civics and Government, 127-13

c. Civic Disposition (Karakter Kewarganegaraan)

Karakter kewarganegaraan adalah sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mewujudkan partisipasi politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum (Cholisin, 2005: 8).

Sifat-sifat yang harus terpenuhi dalam Civic Disposition adalah sebagai berikut:

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri).

Karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

2. Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

Yang termasuk karakter ini adalah:

b. Mengurus diri sendiri;

- c. Memberi nafkah / menopang keluarga;
 - d. Merawat, mengurus dan mendidik anak;
 - e. Mengikuti informasi tentang issue-isue publik;
 - f. Memberikan suara (voting);
 - g. Membayar pajak;
 - h. Menjadi saksi di pengadilan;
 - i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - j. Melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri / masing-masing.
3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Yang termasuk karakter ini antara lain:

- a. Mendengarkan partisipasi orang lain;
 - b. Berperilaku santun (bersikap sopan);
 - c. Menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara;
 - d. Mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.
4. Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara bijak dan efektif

Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena

kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusioal untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat-sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik) diantaranya:

- a. Keberadaban (civility), yang termasuk sifat ini adalah:
 1. Menghormati orang lain;
 2. Menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham;
 3. Mendengarkan pandangan orang lain;
 4. Menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal.
- b. Menghormati hak-hak orang lain, yang termasuk dalam karakter ini adalah:
 1. Menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukum;
 2. Menghormati hak orang lain untuk memegang dan menganjurkan gagasan yang bermacam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandangan-pandangan mereka.
- c. Menghormati hukum, yang termasuk sifat ini adalah:
 1. Berkemampuan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatnya;
 2. Berkemampuan melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak arif dan adil.
- d. Jujur: berkemampuan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.

- e. Berfikiran terbuka: yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
 - f. Berfikir kritis: yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan / kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
 - g. Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi, yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/ mendala, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral untuk melakukannya.
 - h. Ulet/ tidak mudah putus asa: yaitu kemampuan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
 - i. Berpikiran kewarganegaraan, yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan-urusan publik/ kemasyarakatan.
 - j. Kecharuan / memiliki perasaan kesihan: yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung.
 - k. Partiotisme: memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.
 - l. Keteguhan hati: kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntunnya.
 - m. Toleran terhadap ketidakpastian: yaitu kemampuan untuk menerima ketidakpastian yang muncul, karena ketidakcukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang kompleks atau tentang ketegangan antara nilai-nilai fondamental dengan prinsip-prinsip.
5. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat

Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini adalah:

- a. Melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional;
- b. Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.

Sumber: (Cholisin, 2005: 9)

B. Politik

1. Pengertian Politik

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Budiharjo, 1996: 8). Politik berkaitan dengan tujuan-tujuan masyarakat secara umum, hal ini tentunya berkaitan dengan pemegang kekuasaan dan juga wewenang.

Karl W. Deutsch dalam Budiharjo, 1996: 12, menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang dimaksud dalam hal ini adalah keputusan yang berada dalam sektor umum atau sektor publik dari suatu negara, keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai

yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini, politik itu sendiri menyangkut tentang pemerintah.

Surbakti (1999: 1) juga mendefinisikan bahwa politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Politik juga diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di tengah masyarakat (Kartono, 1996: 64).

Wikipedia Indonesia menyebutkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Beberapa sudut pandang lain mengenai politik dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik aristoteles).
- 2) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- 3) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
- 4) Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan pelaksanaan kebijakan publik. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Politik> diunduh 15 Januari 2015, 20:34)

Joyce Mitchell dalam (Budiharjo, 1996: 11) menyatakan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Easton dalam Budiharjo (1996: 13) juga mengatakan kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita dikatakan berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk suatu masyarakat.

2. Konsep-Konsep Pokok Politik

Ada lima konsep pokok tentang politik yaitu:

1) Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Budiharjo, 1996: 9). Politik berkaitan dengan tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

2) Kekuasaan

Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Menurut pandangan ini, politik dipandang sebagai segala kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

3) Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai (Budiharjo, 1996: 11). Pengambilan keputusan dalam politik adalah keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat masyarakat secara luas. Joyce Mitchell dalam (Budiharjo, 1996: 11) menyatakan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

4) Kebijakan Umum

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiharjo, 1996: 12).

Easton dalam Budiharjo (1996: 13) juga mengatakan kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita dikatakan berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk suatu masyarakat.

5) Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

Maksud dari pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Politik dipandang membagikan dan mengalokasikan

nilai-nilai secara mengikat, sehingga ketika pembagian yang dilakukan tidak merata itu akan menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah.

3. Bidang Kajian Materi Politik

Bidang kajian yang dibahas dalam politik meliputi:

- 1) Teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik.
- 2) Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.
- 3) Partai politik , organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dalam pemerintahan dan administrasi.
- 4) Hubungan internasional yang meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasar Politik.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdf) diunduh 18 januari 2015, 19:50)

4. Perilaku Politik

Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Contoh perilaku politik adalah:

- 1) Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin;
- 2) Mengikuti dan berhak menjadi insa politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
- 3) Ikut serta dalam pesta politik;
- 4) Berhak menjadi pemimpin politik;
- 5) Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang tlah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.

([http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasar Politik.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdf) diunduh 18 januari 2015, 19:50)

C. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

1. Perkembangan PPKn di Sekolah Dasar

Mahoney (dalam Budimansyah, 2008: 3) menyatakan *civic education* merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik.

Pendidikan kewarganegaraan mengacu langsung pada perilaku warga negara, oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menunjukkan orientasi bentuk pendidikan karakter, watak dan pendidikan etika kepada warganegara.

Depdiknas 1993 mengungkapkan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tercermin dalam ke lima Pancasila. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa, tentunya nilai-nilai yang diajarkan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang ada dalam Pancasila.

PPKn sebagai mata pelajaran yang berkaitan erat dengan falsafah hidup bangsa memiliki tiga fungsi pokok, pertama, mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila, kedua, mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta budi pekerti luhur, ketiga, membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Budimansyah, 2008: 11).

Mata pelajaran PPKn di SD memiliki tujuan khusus yaitu menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah kerapian, kasih sayang, kebangsaan, ketertiban, tolong menolong, keyakinan, berterus terang, kepuasan hati, keyakinan, tenggang rasa, rela berkorban, ketekunan, keserasian, percaya diri, kebebasan, kedisiplinan, ketaatan, persamaan hak dan kewajiban, keteguhan hati,

tata krama, keindahan, lapang dada, persatuan dan kesatuan dan juga kebijaksanaan (Depdiknas, 1993).

2. Kurikulum PPKn di Sekolah Dasar Menurut Kurikulum 2013

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (pasal 37). Dalam pasal 1 ayat (19), terdapat penjelasan bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum dalam suatu tingkat pendidikan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman tak terkecuali dengan mata pelajaran PPKn. Penyempurnaan kurikulum pembelajaran PPKn selalu berjalan mengikuti kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan.

- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(Budimansyah, 2008: 15)

Kurikulum 2013, PPKn melakukan perkuatan pada empat pilar kebangsaan. Ruang lingkup PPKn menurut kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 2) UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohensif dan utuh.
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Indonesia.

Berdasarkan kurikulum sebelumnya, ruang lingkup kurikulum mata pelajaran PPKn dijabarkan dalam standar isi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda,

keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- 2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku dalam masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warganegara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dan masyarakat demokrasi.
- 7) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

- 8) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

3. Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar Menurut Kurikulum 2013

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran wajib di sekolah dalam pelaksanaannya selalu mengikuti perkembangan kurikulum yang ada. Seperti yang telah dikemukakan dalam bahasan sebelumnya, untuk mata pelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum 2013 telah mengalami penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya.

Sesuai dengan kurikulum 2013, materi pembelajaran PPKn hanya difokuskan pada penguatan empat pilar kebangsaan. Hal tersebut dilandasi atas keprihatinan semakin lunturnya kepribadian dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia seolah menjadi bangsa yang lupa terhadap nilai luhur yang diperjuangkan para pendiri bangsa terdahulu. Gejolak sosial terjadi diberbagai daerah. Kekerasan, pemaksaan kehendak, anarkisme mewabah, dan kasus-kasus separatis muncul sebagai gejala pemisah bangsa, bahkan kasus korupsi semakin meraja rela.

Berdasarkan uraian di atas, empat pilar kebangsaan sangat penting untuk disosialisasikan khususnya melalui mata pelajaran PPKn, karena mata pelajaran PPKn bertujuan untuk membekali warga negara dengan tiga kemampuan yaitu, pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan kewarganegaraan

(civic skill), dan karakter kewarganegaraan (civic disposition) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kurikulum yang baru ini memang ada penyederhanaan materi pembelajaran dari kurikulum sebelumnya. Ada sebagian pokok bahasan pada kurikulum sebelumnya di ajarkan tetapi, untuk kurikulum yang baru ini materi tersebut dihilangkan. Kurikulum 2013 banyak menyortir materi-materi yang perlu diajarkan untuk peserta didik, dan pembelajaran untuk kurikulum 2013 ini difokuskan pada penguatan empat pilar kebangsaan

D. Penulisan Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar atau materi pembelajaran (*instructional materials*) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), ketrampilan, dan sikap atau nilai (Depdiknas, 2006).

Materi fakta ditandai dengan penyebutan nama-nama obyek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Termasuk materi konsep apabila terdapat pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau bagian dari suatu obyek. Dikatakan materi prinsip jika terdapat penerapan hukum, dalil atau rumus. Materi jenis prosedural adalah materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian materi sikap adalah materi yang berkenaan dengan nilai atau sikap.

2. Teknik Pengembangan Bahan Ajar

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Prinsip pemilihan materi pembelajaran harus mengacu pada tiga aspek, yaitu prinsip relevansi (keterkaitan), konsistensi (keajegan), dan juga prinsip kecukupan (materi yang diajarkan cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan).

Dengan memperhatikan tiga prinsip di atas, pemilihan bahan ajar dilakukan dengan tetap menyesuaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada, hal tersebut dikarenakan agar materi yang diajarkan menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada. Langkah-langkah dalam pemilihan bahan ajar adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar.
- 2) Mengidentifikasi jenis-jenis materi ajar.
- 3) Memilih bahan ajar yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi.
- 4) Memilih sumber bahan ajar yang sesuai.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, baru bahan ajar dapat dikembangkan sesuai dengan kreatifitas penyusun tetapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang ada.

3. Cara Penyajian Bahan Ajar dalam Buku Teks

Setelah bahan ajar dikembangkan, dan dirasa cukup materinya, penyusunan bahan ajarpun dilakukan. Penyajian bahan ajar dalam buku teks harus memperhatikan cakupan bahan ajar dan urutan bahan ajar. Hal tersebut diperlukan karena ketepatan dalam menentukan cakupan ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketepatan urutan akan memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran.

Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan materi pembelajarannya apakah kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu materi pembelajaran harus memperhatikan prinsip keluasan dan kedalaman. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu sedikit atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai (Depdiknas, 2006: 13).

Pokok perhatian yang kedua yaitu menentukan urutan bahan ajar, hal tersebut diperlukan dalam penyajian bahan ajar karena urutan penyajian bahan

ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya, dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu:

1) Pendekatan prosedural

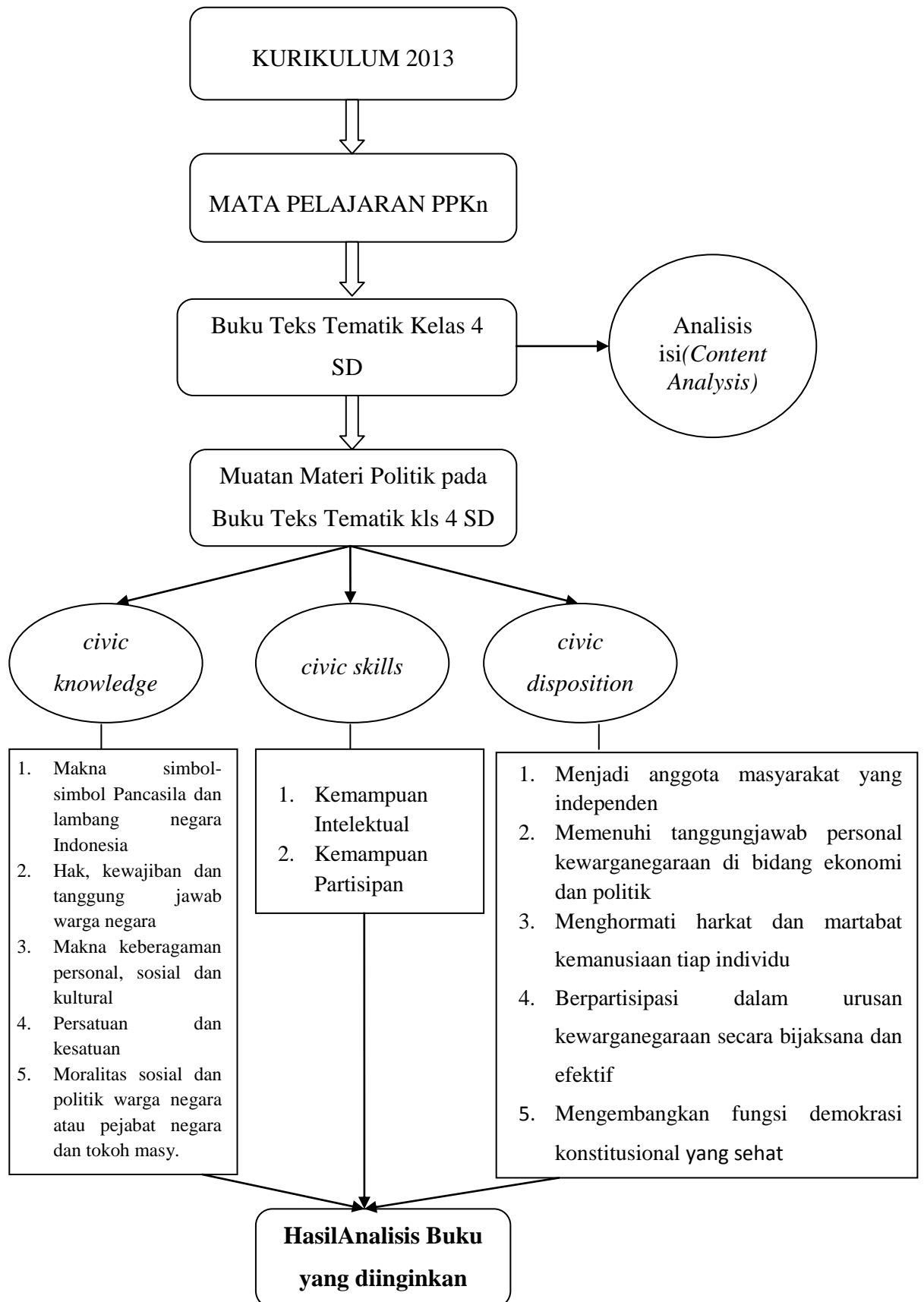
Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas.

2) Pendekatan hierarkis

Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah.

E. Kerangka Berfikir

Dari uraian di atas, terbentuk konsep kerangka berfikir yaitu bermula dengan pemilihan materi pembelajaran dengan memperhatikan tiga prinsip yang sudah diuraikan, kemudian pemilihan bahan ajar tersebut disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, setelah itu baru dilakukan penyusunan buku ajar yang disajikan dalam buku teks dengan tidak mengabaikan pokok perhatian yang ada, kemudian buku teks tersebut digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada tercapai. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Metode penelitian ada dua macam, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moloeng, 2007:3). Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi (Content Analysis) kualitatif. Analisis isi adalah teknik untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya (Bungin, 2007:155). Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif.

B. Objek Penelitian

Objek dan informan penelitian kualitatif adalah objek penelitian yang fokus pada penelitian, yaitu, sasaran penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan objek penelitian, karena yang dianalisis adalah buku teks. Buku tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Buku 1, tema 1, Indahnya Kebersamaan
- 2) Buku 2, tema 2, Selalu Berhemat Energi
- 3) Buku 3, tema 3, Peduli Terhadap Makhluk Hidup

- 4) Buku 4, tema 4, Berbagai Pekerjaan
- 5) Buku 5, tema 5, Pahlawanku
- 6) Buku 6, tema 6, Indahnya Negeriku
- 7) Buku 7, tema 7, Cita-Citaku
- 8) Buku 8, tema 8, Tempat Tinggalku
- 9) Buku 9, tema 9, Makanan Sehat dan Bergizi

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kandungan isi yang ada dalam buku teks tematik kelas 4 SD. Unit analisis tersebut antara lain yaitu kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan muatan politik yang meliputi *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan).

Civic knowledge pada buku terbitan Kemendikbud 2013 ini fokus pada 4 pilar kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika . Muatan materi pokok PPKn yang dibahas meliputi :

- 1) Makna dan simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia;
- 2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara;
- 3) Makna keberagaman personal, sosial dan kultural;
- 4) Persatuan dan kesatuan;
- 5) Moralitas sosial dan politik warga negara atau pejabat negara, dan tokoh masyarakat.

Civic skills dibedakan menjadi dua yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan partisipan. *Civic desposition* (karakter kewarganegaraan) dibedakan menjadi 5 karakter yang utama yaitu, menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif, dan mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.

D. Uji Keabsahan Data / Verifikasi Data

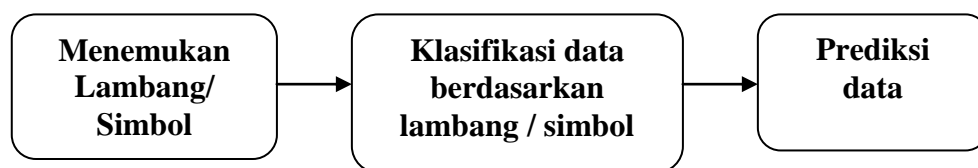
Salah satu cara paling penting dalam uji dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi teori.

Uji keabsahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan teori. Teknik ini dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan- kemungkinannya dapat ditunjang dengan data (Bungin,2007:257).

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moelong, 1992 : 103).

Sesuai dengan metode yang digunakan yaitu analisis isi kualitatif. Secara teknik, Content analysis mencakup upaya-upaya, klasifikasi lambang- lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi. Content Analysis sering digunakan dalam analisis- analisis verifikasi.



Gambar 2. Content Analysis

Pada penelitian ini, buku teks tematik yang dipilih yaitu buku yang disusun oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Buku tematik tersebut terdiri dari sembilan tema. Peneliti kemudian membuat lambang/ simbol/ indikator yang akan digunakan. Setelah itu baru dibuat klasifikasi atau pengelompokan data dari isi buku untuk dilakukan analisis isi buku. Kemudian indikator tersebut digunakan untuk mengetahui isi buku tersebut untuk memperoleh hasil mengenai isi buku.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini, didapatkan beberapa simpulan dari hasil penelitian tersebut. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah:

Buku teks tematik kelas 4 SD terbitan Kemendikbud 2013 ini merupakan buku teks berbasis aktivitas sehingga tidak banyak materi yang muncul dalam buku ini. Buku teks tematik ini lebih banyak berisi tentang kegiatan siswa baik aktivitas mandiri maupun kelompoknya.

Analisis muatan materi politik pada buku tematik kelas 4 SD berdasarkan *civic knowledge, civic skills, dan civic disposition*, ruang lingkup PPKn sesuai kurikulum 2013, dalam buku ini terjabar menjadi lima ruang lingkup yaitu makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia; hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara; makna keberagaman personal, sosial dan kultural; persatuan dan kesatuan; moralitas sosial dan politik warga negara atau pejabat negara dan tokoh masyarakat. Semua ruang lingkup tersebut masuk ke dalam kajian buku, akan tetapi lebih cenderung banyak materi tentang persatuan dan kesatuan juga tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang banyak muncul dalam pokok bahasan buku tersebut. *Civic skills dan civic disposition* menyesuaikan kajian materi yang ada dalam buku tersebut.

Muatan materi politik pada buku teks tematik kelas 4 SD ini terjabarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang dimunculkan. Pengenalan simbol-simbol

kenegaraan seperti Pancasila, pengenalan sosok pemimpin bangsa dan juga pemahaman kebangsaan sebagai pemahaman dasar tentang politik. Aktivitas-aktivitas yang tersusun dalam buku ini juga memunculkan terkait pemahaman kegiatan politik dasar.

B. SARAN

Saran yang diberikan penulis untuk perbaikan buku tematik kelas 4 SD terbitan Kemendikbud ini adalah:

1. Bagi Pengajar

Buku teks tematik ini merupakan buku teks yang berbasis aktivitas, hal tersebut tentunya berpengaruh pada cara pembelajaran yang dilakukan. Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan pengajar lebih berusaha keras untuk membangun pemahaman siswa melalui ketertabatan materi yang ada, dan aktivitas-aktivitas siswa yang ada dalam buku.

2. Bagi Penulis Buku

Buku tematik terbitan kemendikbud ini merupakan buku tematik terbitan pertama sebagai penunjang pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang baru. Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan kedepannya penulis dapat melakukan perbaikan terhadap pengembangan isi buku sebagai penyempurnaan buku yang sebelumnya.

3. Bagi Kemendikbud sebagai Penerbit Buku

Buku tematik ini merupakan buku edisi terbaru dengan basis pembelajaran yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Kemendikbud

sebagai penerbit buku tematik ini diharapkan mampu memberikan masukan lebih guna pengembangan terhadap penyempurnaan isi buku.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Gabriel Almond dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amri, Sofan. 2013. *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim dan Kasim Suryadi. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Rajawali Pers
- . 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenata Media Group
- Cholisin. 2005. *Pengembangan Paradigma Baru PKn*. Jogjakarta : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY
- . 2011. *Pengembangan Karakter dalam Materi Pembelajaran PKn*. Jogjakarta: Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY.
- Depdiknas. 1993. *Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, Jakarta.
- . 2006. *Pedoman Memilih dan Menyusun Buku Ajar*. Jakarta.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan politik*. Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Moleong. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Munib, Achmad. 2011. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT Unnes Press.

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 1990. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.

S. Udin Winataputra dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.

Soegito, AT. 2009. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT Unnes Press.

Sunarto. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Semarang: Unnes.

Sunarto dkk. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Semarang: UPT Unnes Press.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Winarno. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang-undangan lainnya

Permendiknas No. 2 Tahun 2008 mengenai buku teks

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidakyah.

Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Internet

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdf di unduh 18 Januari 2015 19:50

<http://id.wikipedia.org/wiki/Politik> di unduh 15 januari 2015 20:34

<http://hamiddarmadi.blogspot.com/2013/07/urgensi-pendidikan-pancasila-dan.html> diunduh 12 januari 2015 8:50

LAMPIRAN

ANALISIS CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC SKILL, DAN CIVIC DISPOSITION

BUKU TEMATIK KELAS 4 SD MATA PELAJARAN PPKN

Civic Knowledge(Pengetahuan Kewarganegaraan)meliputi:

1. Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia
2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara
3. Makna keberagaman personal, sosial dan kultural
4. Persatuan dan kesatuan
5. Moralitas sosial dan politik warga negara atau pejabat negara, dan tokoh masyarakat

Civic Skills(Ketrampilan Kewarganegaraan) mencakup:

1. Intellectual skills (kemampuan intelektual)
2. Participation skills (kemampuan partisipasi)

Civic Disposition (Karakter Kewarganegaraan), karakter utamanya meliputi:

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.
2. Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif.
5. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.

TEMUAN CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC SKILLS, DAN CIVIC DISPOSITION DALAM BUKU TEKS TEMATIK

KELAS 4 SD

Buku 1. Indahnya Kebersamaan

Civic Knowledge : Pancasila dan lambang negara

Makna keberagaman personal, sosial dan kultural

Persatuan dan kesatuan

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Keberagaman Budaya Bangsaku	Pembelajaran I: Persatuan dan kesatuan bangsa Makna Keberagaman personal, sosial dan kultural Materi “Mengenal	1. Mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman 2. Mendeskripsikan tentang suku minang		1. Sikap menghormati hak-hak orang lain. 2. Berpikiran terbuka terhadap budaya orang lain yang berbeda. 3. Sikap toleransi terhadap sesama bangsa karena perbedaan budaya

	suku minang”			
	Pembelajaran III: Pancasila dan lambang Negara Indonesia Materi “Simbol Pancasila”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis makna sila-sila Pancasila dengan menganalisis gambar 2. Menghubungkan hal-hal baik yang didapatkan dari permainan dengan nilai-nilai pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat poster tema “ walaupun berbeda-beda kita adalah satu” 	
	Pembelajaran IV: Persatuan dan kesatuan Materi “Alat musik tradisional (Harmoni)” Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menceritakan sikap harmoni dengan makna yang terkandung dalam sila pancasila 		

	Materi “Sila Persatuan Indonesia”			
Kebersamaan dalam keberagaman	Pembelajaran I: Persatuan dan kesatuan Materi “Fohombo Batu”	1. Menceritakan pengalaman bermain bersama dengan orang yang berbeda-beda suku dan budaya		
	Pembelajaran IV: Persatuan dan kesatuan Materi “Situs Trowulan”	1. Mengaitkan situs trowulan dengan makna persatuan dan kesatuan	1. Menampilkan drama dengan tema persatuan dan kesatuan	
Bersyukur atas	Pembelajaran III:	1. Mendiskusikan tentang jenis-jenis makanan khas daerah di		

keberagaman	Persatuan dan kesatuan materi “makanan khas daerah”	nusantara		
	Pembelajaran IV: Persatuan dan kesatuan materi “Toleransi ketika ada teman yang sakit”	1. Mendiskusikan tentang contoh dan manfaat sikap bekerja sama dalam bentuk peta pikiran		
Bangga pada budayaku	Pembelajaran I: Persatuan dan kesatuan materi “gambar pakaian adat daerah”	1. Mendiskusikan tentang pakaian adat daerah		

	Pembelajaran II: Persatuan dan kesatuan materi “gambar makanan tradisional khas daerah”	1. Mendiskusikan tentang makanan tradisional khas daerah		
	Pembelajaran III: Makna keberagaman Personal, sosial dan kultural	1. Mendeskripsikan tentang pakaian adat dan makanan tradisional daerah		
	Pembelajaran IV: Makna keberagaman Personal, sosial dan kultural		1. Membuat pameran budaya	

Buku 2. Selalu Berhemat Energi

Civic Knowledge : Pancasila

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara

Persatuan dan kesatuan

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Macam-macam sumber energi	Pembelajaran V: Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Materi “Minyak bumi”	1. Menjelaskan penggunaan energi secara aman dan hemat di rumah.	1. Membuat poster tentang hemat energi.	1. Berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat kritis mengenai bagaimana cara menghemat energi. 2. Memiliki sikap toleransi yang bisa dijaga dan ditunjukkan saat bermain bersama.

Gerak dan Gaya	Pembelajaran II: Persatuan Bangsa Materi “Gaya Gesek”	1. Menjelaskan nilai bersatu berdasarkan materi gaya gesek.		
	Pembelajaran III: Persatuan dan kesatuan Materi “Senam”	1. Mengemukakan pendapat tentang sikap yang harus ditunjukkan saat bermain bersama.	1. Menstimulasikan nilai bersatu dalam praktek senam.	

Buku 3. Peduli Terhadap Makhluk Hidup

Civic Knowledge : Pancasila

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku	Pembelajaran III: Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab warga negara	1. Menjelaskan hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan terhadap makhluk hidup di lingkungan rumah.		1. Sikap peduli terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. 2. Sikap tanggung jawab menjaga lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita tinggal.
	Pembelajaran IV: Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab warga negara	1. Mengemukakan pendapat dan memberikan contoh kewajiban manusia terhadap hewan dan tumbuhan.		

Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku	Pembelajaran II: Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab warga negara	1. Mengemukakan pendapat dan memberikan contoh kewajiban manusia terhadap hewan dan tumbuhan.		
	Pembelajaran III: Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab warga negara	1. Memberikan contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban sebagai warga di lingkungan sekolah untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan.		
Ayo Cintai Lingkungan	Pembelajaran I: Pancasila	1. Mengelompokkan sikap-sikap peduli lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. 2. Menjelaskan kaitan sila Pancasila dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan sikap cinta lingkungan dengan benar.	1. Merancang poster tentang kepedulian terhadap lingkungan.	
	Pembelajaran V: Pancasila	1. Menjelaskan cara-cara mencintai lingkungan dengan benar. 2. Menjelaskan hubungan sila Pancasila dengan perilaku manusia yang berhubungan		

		dengan sikap cinta lingkungan denga benar.		
--	--	---	--	--

Buku 4. Berbagai Pekerjaan

Civic Knowledge : Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Jenis-Jenis Pekerjaan	Pembelajaran I: -Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab warga negara -Keberagaman personal, sosial dan kultural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan. 2. Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan pekerjaan. 3. Menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pekerja. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap toleransi terhadap perbedaan jenis-jenis profesi seseorang. 2. Sikap peduli terhadap lingkungan dengan cara berpartisipasi aktif dalam penanggulangan banjir

	materi “jenis-jenis pekerjaan”			
	Pembelajaran II: Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab warga negara materi teks “Si semut”	1. Menjelaskan kewajiban sebagai seorang pekerja		
	Pembelajaran III: Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab warga negara	1. Menjelaskan kewajiban dan tugas seorang pekerja dalam masyarakat.		

Barang dan Jasa	Pembelajaran III: Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Materi “ peristiwa alam”	1. Memberikan pendapat atau gagasan mengenai cara-cara penanggulangan bencana banjir		
	Pembelajaran V: Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara		1. Membuat poster hemat air	
Pekerjaan Orang Tuaku	Pembelajaran IV: Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara	1. Menganalisis peta perkembangan hutan Kalimantan		

	Materi “hutan kalimantan”			
--	---------------------------	--	--	--

Buku 5. Pahlawanku

Civic Knowledge : Pancasila

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara

Persatuan dan Kesatuan

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Perjuangan Para Pahlawanku	Pembelajaran I: Persatuan dan kesatuan	1. Menjelaskan pentingnya rasa persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menguraikan contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan.		1. Menjadi anggota masyarakat yang baik yang memiliki sikap gotong royong. 2. Memiliki sikap patriotisme yang

	Materi teks “Raja Purnawarman”			ditunjukkan melalui kegiatan upacara bendera.
	Pembelajaran VI: Persatuan dan kesatuan Materi “Sultan Iskandar muda”	1. Menjelaskan arti bersatu dalam perjuangan “Sultan Iskandar Muda”.		3. Bersedia melakukan negosiasi dan kompromi sebagai perwujudan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila.
Pahlawanku Kebanggaanku	Pembelajaran IV: -Persatuan dan kesatuan -Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara	1. Menjabarkan sikap yang menunjukkan kewajiban sebagai seorang pelajar.		

	Materi “Ki Hajar Dewantoro”			
	-Pembelajaran V: Persatuan dan kesatuan -Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Materi “Upacara Bendera”	1. Menjelaskan sikap yang harus dilakukan pada waktu upacara bendera. 2. Menjelaskan pentingnya melaksanakan upacara bendera.		
Sikap	Pembelajaran I:	1. Mengelompokkan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.		

Kepahlawananku	Pancasila			
	Pembelajaran III: Pancasila dan Persatuan	1. Mengelompokkan contoh sikap yang mencerminkan sikap tanah air dan bangsa	1. Menceritakan sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air.	

Buku 6. Indahnya Negeriku

Civic Knowledge : Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara

Persatuan dan kesatuan

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan	Pembelajaran II: Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Materi teks "Pelestarian Badak Jawa"	1. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam 2. Mengelompokkan contoh tindakan yang bisa dilakukan dalam pelestarian lingkungan.		1. Memiliki tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga sumber daya alam, menjaga peninggalan sejarah, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Memiliki sikap kepedulian terhadap sesama melalui tindakan gotong royong.
	Pembelajaran III: Hak, kewajiban,	1. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam 2. Mengelompokkan contoh		

	<p>dan tanggung jawab warga negara</p> <p>Materi “Manfaat Pohon Pinus”</p>	<p>tindakan yang bisa dilakukan dalam pelestarian lingkungan</p>		
	<p>Pembelajaran V</p> <p>Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara</p>		<p>1. Melakukan wawancara dan diskusi langsung mengenai perilaku-perilaku terkait pelestarian lingkungan</p>	
<p>Keindahan Alam Negeriku</p>	<p>Pembelajaran I:</p> <p>Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara</p> <p>Materi “Teks Keindahan Alam</p>	<p>1. Menjelaskan alasan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.</p>		

	Negeriku ”			
	Pembelajaran III: Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Materi “Teks Keindahan Hutan Kalimantan”	1. Mengelompokkan contoh perilaku peduli lingkungan.	1. Melakukan wawancara dan diskusi langsung mengenai perilaku- perlaku terkait pelestarian lingkungan	
	Pembelajaran VI Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Materi “Danau Toba”	1. Menjelaskan pentingnya sikap peduli lingkungan.	1. Membuat poster peduli lingkungan.	

Indahnya Peninggalan Sejarah	Pembelajaran III: Persatuan Bangsa materi “Museum Nasional”	1. Menyebutkan contoh kewajiban warga negara sehubungan dengan pelestarian peninggalan sejarah.		
	Pembelajaran VI: Persatuan Bangsa -	1. Menjabarkan contoh-contoh perilaku yang menjelaskan tentang nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari.		

Buku 7. Cita-Citaku

Civic Knowledge : Simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara

Persatuan dan kesatuan

Makna keberagaman personal, sosial dan kultural

Moralitas sosial dan politik warga negara atau pejabat negara dan tokoh masyarakat

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Aku dan Cita-Citaku	Pembelajaran I: Simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia “teks Pancasila”	1. Menjelaskan arti dan makna simbol-simbol dalam Pancasila. 2. Mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.		1. Sikap patriotisme menghormati Pancasila. 2. Menjadi anggota masyarakat yang mandiri dalam membantu melestarikan alam. 3. Sikap toleransi terhadap keberagaman individu dlm masyarakat.
	Pembelajaran III:	1. Mendeskripsikan hak dan kewajiban warga negara dalam		

	<p>Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara</p> <p>dan Persatuan Bangsa materi “peta kenampakan hutan Indonesia”</p>	<p>melestarikan alam</p>		
	<p>Pembelajaran IV</p> <p>Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat percobaan. 2. Mengetahui manfaat mematuhi aturan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan percobaan membuat batik. 	
	<p>Pembelajaran V:</p> <p>Hak, kewajiban, dan tanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelompokkan contoh sikap kewajiban sebagai seorang pelajar. 		

	warga negara			
Hebatnya Cita-Citaku	<p>Pembelajaran VI:</p> <p>Makna keberagaman personal, sosial dan kultural</p>	1. Menjelaskan keberagaman cita-cita serta manfaatnya.	<p>1. Menyusun pazzle cita-cita</p> <p>2. Membuat diorama dari bahan alam</p>	
Giat Berusaha Meraih Cita-Citaku	<p>Pembelajaran I:</p> <p>-Makna keberagaman personal, sosial dan kultural</p> <p>-Moralitas sosial dan politik warga negara atau pejabat</p>	1. Menjelaskan keberagaman cita-cita dan manfaatnya	1. Bermain drama untuk menjelaskan suatu cita-cita.	

	negara dan tokoh masyarakat			
	Pembelajaran III: Makna keberagaman personal, sosial dan kultural	1. Menjelaskan keberagaman sifat individu		
	Pembelajaran V Makna keberagaman personal, sosial dan kultural	2. Menemukan manfaat keberagaman sifat individu di sekolah.		

Buku 8. Tempat Tinggalku

Civic Knowledge : Persatuan Bangsa

Hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara

Makna keberagaman personal, sosial dan kultural

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Lingkungan Tempat Tinggalku	Pembelajaran V: Pancasila Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara materi “ sarana umum”	1. Menjelaskan cara menjaga sarana umum.		1. Sifat tanggung jawab 2. Sifat peduli terhadap lingkungan 3. Sifat untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain.

	<p>Pembelajaran VI:</p> <p>Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara</p> <p>Bagan sarana umum dan manfaatnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kewajiban warga negara di lingkungan rumah. 2. Menjelaskan manfaat dan cara menjaga lingkungan. 		
Keunikan Daerah Tempat Tinggalku	<p>Pembelajaran I:</p> <p>Makna keberagaman personal, sosial dan kultural</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi keunikan dari berbagai daerah 2. Memberikan pendapat tentang keberagaman suatu daerah 		
	<p>Pembelajaran V:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan manfaat gotong royong 2. Mengamati tradisi masyarakat 		

	<p>-Persatuan Bangsa</p> <p>-Makna keberagaman personal, sosial dan kultural</p> <p>materi “teks Tedak Sinten” dan mengamati gambar terkait budaya gotong royong</p>	Indonesia terutama suku Jawa		
	<p>Pembelajaran VI:</p> <p>Persatuan dan kesatuan materi “teks masyarakat</p>		<p>1. Membuat rencana perbaikan sikap yang ditunjukkan dalam bentuk kegiatan kerja sama.</p>	

	Badui”			
Giat Berusaha Meraih Cita- Citaku	Pembelajaran III: Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Materi gambar lingkungan pegunungan	1. Menyebutkan manfaat menjaga kesejukan lingkungan. 2. Menjelaskan tindakan atau sikap yang bisa dilakukan untuk menjaga kesejukan lingkungan.		
	Pembelajaran IV: Persatuan dan kesatuan materi “ gambar bentuk kerjasama”	1. Mengidentifikasi kegiatan kerjasama di lingkungan pedesaan.		
	Pembelajaran V	1. Menjelaskan hak kewajiban sebagai warga masyarakat.		

	Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara			
--	--	--	--	--

Buku 9 . Makanan Sehat dan Bergizi

Civic Knowledge : Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara

Subtema	Civic Knowledge	Civic Skill		Civic Disposition
		Intelektual	Partisipan	
Makananku Sehat dan Bergizi	Pembelajaran IV: Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara materi “ Berat Badan”	1. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.		1. Kepedulian terhadap diri sendiri.

Manfaat Makanan Sehat dan Bergizi	Pembelajaran II: Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara materi “teks Sayur dan Buah Bukan Sekedar Pelengkap Makanan”	1. Mendiskripsikan contoh-contoh sikap disiplin mengkonsumsi sayur dan buah.	1. Menerapkan sikap disiplin mengkonsumsi sayur dan buah dalam kehidupan sehari-hari.	
	Pembelajaran IV: Hak, kewajiban dan tanggung jawab	1. Menjelaskan pentingnya memiliki kebiasaan sikap hidup sehat dalam memilih makanan dan minuman sebagai hak dan kewajiban warga melalui kegiatan observasi, survei, mencatat dan mengolah data	1. Melakukan observasi kandungan gizi berbagai jenis makanan dalam kemasan.	

	<p>warga negara</p> <p>materi “analisis gambar kemasan”</p>			
	<p>Pembelajaran V:</p> <p>Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara</p> <p>materi “olah data diagram lingkaran”</p>	<p>1. Menjelaskan pentingnya memiliki kebiasaan sikap hidup sehat dalam memilih makanan dan minuman melalui kegiatan pengolahan data.</p>	<p>1. Menerapkan sikap hidup sehat dalam memilih makanan untuk menjaga kondisi kesehatan.</p>	

Kebiasaan Makananku	Pembelajaran I: Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara Materi” jurnal rencana mengkonsumsi makanan sehat setiap hari”	1. Menjelaskan pentingnya memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman sehat bagi kesehatan tubuh melalui kegiatan diskusi dan pengisian jurnal.	1. Mengaplikasikan kegiatan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat bagi kesehatan tubuh melalui kegiatan diskusi dan pengisian jurnal.	
	Pembelajaran II: Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara materi “ teks Manfaat Makan	1. Menganalisis pentingnya kebiasaan makan pagi bagi kesehatan tubuh.	1. Mengaplikasikan kegiatan makan pagi melalui pengisian jurnal	

	Pagi”			
	Pembelajaran V Hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara	1. Menjelaskan hak kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan sekolah.		